

Analisis Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kota Bandar Lampung

Ovaliani Anna Sasmita¹, Erike Anggraeni², Syamsul Hilal³

¹Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

^{2,3}UIN Raden Intan Lampung

*Correspondence email: Ovalianianna@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan telah membuat jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungasn dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Dengan demikian, pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana pula pembangunan secara umum tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah dana banuan program keluarga harapan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bandar lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum menyeluruhnya bantuan Program Keluarga Harapan dan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: Kemiskinan; PKH; Kesejahteraan.

ABSTRACT

Poverty has made millions of people unable to get a quality education, difficulties in financing health care, lack of savings and no investment, lack of access to public services, lack of employment opportunities, lack of social security and protection for families, increased migration flows to cities, and more severe, poverty causes millions of people to meet their limited needs for food, clothing and boards. Social welfare problems that are currently developing indicate that there are citizens whose rights to their basic needs have not been properly fulfilled because they have not received social services from the state. Thus, social welfare development, as well as development in general, cannot be carried out by the government alone. The purpose of this research is to find out whether the Family Hope Program assistance fund can improve people's welfare in Bandar Lampung. The method used in this research is to use qualitative methods. Based on the results of the study, it was found that the assistance from the Family Hope Program had not been comprehensive and the level of poverty in Bandar Lampung City was not yet complete.

Keywords: Misery; PKH; Well-being.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah publik yang kompleks, dan bersifat multidimensi. Wrihatnolo berpendapat bahwa multidimensional sifat kemiskinan tidak hanya disebabkan satu faktor, melainkan berbagai faktor seperti; aspek ekonomi, sosiologis, antropologis, kebijakan, teknologi serta perubahan global. Kemiskinan juga berimplikasi terhadap pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi, serta partisipasi politik masyarakat dalam sebuah negara.

Kemiskinan telah membuat jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang

terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadialasan yang sempurna rendahnya *Human Development Index* (HDI). Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya. Persoalan kemiskinan ini juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori pengangguran terselubung, dimana mereka tidak produktif pekerjaannya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.

Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan). Dimana Lampung mencapai 1,08 juta orang (12,62 persen), turun sebesar 7,21 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 1,09 juta orang (12,76 persen). Selama periode September 2020 - Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 4,68 ribu orang (dari 259,28 ribu orang pada September 2020 menjadi 254,60 ribu orang pada Maret 2021), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 2,53 ribu orang (dari 831,86 ribu orang pada September 2020 menjadi 829,33 ribu orang pada Maret 2021).

Sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 2,53 ribu orang (dari 831,86 ribu orang pada September 2020 menjadi 829,33 ribu orang pada Maret 2021). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 adalah sebesar 9,29 persen atau turun 0,30 poin dibandingkan September 2020 yang sebesar 9,59 persen. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2021 sebesar 14,18 persen atau mengalami penurunan 0,04 poin jika dibandingkan September 2020 yang sebesar 14,22. Data statistik kota bandar lampung menunjukkan bahwa jumlah penduduk kota Bandar Lampung tahun 2020 adalah 93,74 jiwa dan 634.743 nya adalah data penduduk miskin di kota Bandar Lampung jika di persen dari 8,81 persen, Dan data statistik kemiskinan kota Bandar Lampung di tahun 2021 adalah 654 576. Pada bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1,08 juta orang (12,62 persen), turun sebesar 7,21 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 1,09 juta orang (12,76 persen). (bps, 2021)

Kecamatan kedamaian memiliki Jumlah penduduk prasejahtera terbanyak di kota bandar lampung sebanyak 5111 orang sedangkan yang paling sedikit adalah kecamatan enggal sebanyak 1346 orang. Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan Kota Bandar Lampung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tingkat kemiskinan Kota Bandar Lampung selama tahun-tahun terakhir ini terus menunjukkan penurunan, namun masih tinggi yang kemiskinan dibanding wilayah lainnya yang sudah baik ini mengisyaratkan bahwa Kota Bandar Lampung masih harus menaruh perhatian pada kemiskinan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan.

Populasi penduduk juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemiskinan, namun besaran pengaruhnya relatif kecil, sedangkan pendidikan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan pengaruh paling besar. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda, baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kota Bandar Lampung untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Masalah utama untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Kota Bandar Lampung adalah kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah, akses antara lokasi rumah dan sekolah terlalu jauh, dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan formal masih rendah. Hal yang perlu di prioritaskan untuk diintervensi adalah menurunkan lagi anak-anak yang putus sekolah.

Masalah dasar lainnya yang telah dilakukan oleh Wali kota Kota Bandar Lampung yaitu masalah pendidikan bagi generasi muda. Tingkat pendidikan merupakan indikator yang paling berpengaruh dalam penurunan kemiskinan. Rata-rata lama sekolah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa pertumbuhan berpengaruh

negatif dan signifikan dalam mengurangi kemiskinan, namun pengaruh pertumbuhan ekonomi tersebut relatif tidak terlalu besar.(Andika, 2021)

Terkait dengan permasalahan kemiskinan, BAPPEDA berkordinasi dengan UPTD – UPTD yang ada. Untuk menuntaskan kemiskinan secara perlahan di Kota Bandar Lampung, perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada SKPD-SKPD terkait dalam penyusunan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. Dalam penyusunan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan hendaknya sudah disertai dengan jumlah, lokasi, dan sasaran rumah tangga/penduduk miskin yang akan diintervensi (*by name dan by address*) sehingga akan memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kedepannya. Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan Kota Bandar Lampung dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tingkat kemiskinan Kota Bandar Lampung selama tahun-tahun terakhir ini terus menunjukkan penurunan, namun masih tingginya angka kemiskinan dibanding wilayah lainnya yang sudah baik, ini mengisyaratkan pada kita bahwa Bandar Lampung masih harus menaruh perhatian pada kemiskinan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pengentasan kemiskinan dengan memberi bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin di Indonesia. Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindak lanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Dengan demikian, pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana pula pembangunan secara umum tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Pembangunan sebaiknya dilaksanakan secara sinergis antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Guna mencapai kondisi tersebut, perlu dibangkitkan semangat kebersamaan pada masyarakat untuk dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya berdasarkan potensi yang dimilikinya sendiri. Penyaluran bantuan sosial yang tepat waktu dan tepat sasaran menjadi kunci dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Tanah Air.(Habibah *et al.*, 2020) Pemerintah terus memberi perhatian khusus dan fokus pada upaya mengurangi kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan. Bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021. Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan. “Untuk program PKH dan tetap berjalan dengan normal,” katanya. Untuk PKH, tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp30,4 triliun. Kemudian untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18,5 juta KPM dengan anggaran Rp44,7 triliun.(Widuri and Magatsari, 2021)

Belum menyeluruhnya bantuan Program Keluarga Harapan dan besarnya tingkat kemiskinan. Setelah paparan Program Keluarga Harapan, Indeks Kemiskinan di kota Bandar Lampung serta Kesejahteraan di Kota Bandar Lampung apakah adanya Program Keluarga Harapan apakah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung dan dapat meningkatkan Kesejahteraan di Kota Bandar Lampung mengingat tidak semua lapisan masyarakat miskin mendapat kanbantuan Program Keluarga Harapan. Dengan adanya penelitian ini penulis ingin mengetahui dan melihat analisis Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan di Kota Bandar Lampung.

METODE

Metode penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa wawancara kepada para pelaku Program Keluarga Harapan(PKH) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dikota Bandar Lampung. Jumlah populasi dan sampel yang diambil adalah dari data penduduk Program Keluarga Harapan (PKH) dikota Bandar Lampung. Adapun dalam

penelitian ini besar kecilnya sampel tersebut, peneliti berpedoman pada pendapat pada slovin, maka sample minimal yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 399 responden PKH.

HASIL

Konsep Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Bandar Lampung.

Berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai criteria meliputi:

1. Tidak mempunyai sumber mata pencarian dan / atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan primer;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sederhana
3. Tidak mampu dan mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis, kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam rumah satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok yang sudah usang /berlumut atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/kramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Mempunyai penerapan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
9. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/ orang dan
10. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau air tak terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya.

Menurut sekjen kemensos berhasil penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif tetapi juga harus didukung dengan criteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan *up to date*, untuk mendapatkan data yang *up to date* tersebut dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kemensos) secara terus menerus mengembangkan aplikasi system informasi kesejahteraan social (SIKS) dengan nomengklatur SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation), system terserbut dapat diakses dinas social provinsi dan kabupaten/kotaseluruh Indonesia selanjutnya data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat digunakan oleh kementerian/Lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan. Menurut sekjen kemensos aplikasi SIKS-NG dilengkapi dengan variable-variabel yang terdapat dalam form Basis Data Terpadu, sehingga informasi yang dibutuhkan tentang masyarakat miskin akan semakin lengkap. Dengan demikian akan mudah mengintegrasikannya kedalam Basis Data Terpadu (BDT) dan seluruh program perlindungan social secara nasional dan sekarang disebut juga dengan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun pada tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KESOS) Kementerian Sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk menjadi sistem perlindungan sosial yang lebih baik di Indonesia. Penerima manfaat program ini adalah rumah tangga sangat miskin yang memiliki ibu hamil dan anak usia 0-15 tahun (balita atau anak usia sekolah). Bandar Lampung memiliki 35.000/anggota PKH, 67 e-warung, 130 pendamping PKH yang tersebar di 12 kecamatan di Bandar Lampung, pendamping PKH tersebut melalui seleksi kementerian sosial. Sebagai kewajibannya penerima manfaat PKH tersebut harus memeriksakan anak balita dan ibu hamil kelayakan kesehatan dan menyekolahkan anaknya. Peran pendamping PKH sangat menentukan keberhasilan program. Peran dan keterampilan yang dapat dilakukan pendamping PKH antara lain: Fasilitasi, pendidik, perwakilan dan teknikal. Meskipun tidak semua peran dan keterampilan yang

dilaksanakan oleh Pendamping PKH karena sangat dipengaruhi situasi dan kondisi lingkungan sehingga kualitas dan fleksibilitas pendamping PKH di lapangan menjadi penentu pelaksanaan di lapangan. Secara umum PKH adalah program yang memberikan bantuan uang tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan sebagai imbalannya RTSM tersebut diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. PKH dilatar belakangi karena masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. (Fraser, Aldrich and Small, 2021)

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Dengan demikian, pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana pula pembangunan secara umum tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Pembangunan sebaiknya dilaksanakan secara sinergis antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Guna mencapai kondisi tersebut, perlu dibangkitkan semangat kebersamaan pada masyarakat untuk dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya berdasarkan potensi yang dimilikinya sendiri. Penyaluran bantuan sosial yang tepat waktu dan tepat sasaran menjadi kunci dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Tanah Air. Pemerintah akan terus memberi perhatian khusus dan fokus pada upaya mengurangi kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Dengan demikian, pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana pula pembangunan secara umum tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Pembangunan sebaiknya dilaksanakan secara sinergis antar pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Guna mencapai kondisi tersebut, perlu dibangkitkan semangat kebersamaan pada masyarakat untuk dapat mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya berdasarkan potensi yang dimilikinya sendiri. Penyaluran bantuan sosial yang tepat waktu dan tepat sasaran menjadi kunci dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Tanah Air. Pemerintah akan terus memberi perhatian khusus dan fokus pada upaya mengurangi kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan. Bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021. Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan. “Untuk program PKH dan tetap berjalan dengan normal,” katanya. Untuk PKH, tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp30,4 triliun. Kemudian untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18,5 juta KPM dengan anggaran Rp44,7 triliun.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa belum menyeluruhnya bantuan Program Keluarga Harapan dan besarnya tingkat kemiskinan. Setelah paparan Program Keluarga Harapan, Indeks Kemiskinan di kota Bandar Lampung serta Kesejahteraan di Kota Bandar Lampung sebagian dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung dan dapat meningkatkan Kesejahteraan di Kota Bandar Lampung tetapi mengingatangka tidak semua lapisan masyarakat miskin mendapat kan bantuan Program Keluarga Harapan khususnya di pedesaan yang penduduknya sangat banyak sehingga sulit untuk terorganisir, sehingga perlunya strategi yang tepat untuk menanggulangi hal tersebut, dan bisa mengurangi jumlah kemiskinan di pedesaan yang sulit terjangkau oleh pemerintah.

SIMPULAN

Pemerintah akan terus memberi perhatian khusus dan fokus pada upaya mengurangi kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan. Bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021. Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Belum menyeluruhnya bantuan Program Keluarga Harapan dan besarnya tingkat kemiskinan. Setelah paparan Program Keluarga Harapan, Indeks Kemiskinan di kota Bandar Lampung serta Kesejahteraan di Kota Bandar Lampung sebagian dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung dan dapat meningkatkan Kesejahteraan di Kota Bandar Lampung tetapi mengingatangka tidak semua lapisan masyarakat miskin mendapat kan bantuan Program Keluarga Harapan khususnya di pedesaan yang penduduknya sangat banyak sehingga sulit untuk terorganisir, sehingga perlunya

strategi yang tepat untuk menangguli hal tersebut, dan bisa mengurangi jumlah kemiskinan di pedesaan yang sulit terjangkau oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, S. (2021) 'Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)', *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1), pp. 44–55. doi: 10.56633/jsie.v2i1.227.
- Habibah, A. N. *et al.* (2020) 'Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), p. 251. doi: 10.29040/jiei.v6i2.1014.
- Widuri, T. S. and Magatsari, H. (2021) 'Modal Sosial Balita Dalam Komitmen Kesehatan Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19 The Social Capital of Toddler in the Health Commitment of the Program Keluarga Harapan During Covid-19 Pandemic Tunjung Senja Widuri *, Hario Megatsari Fakult', 15(2), pp. 136–142.